



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan RI, MenPAN dan RB RI, dan Ketua DPD RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 13 April 2022.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Pembahasan RUU Mengenai Penanggulangan Bencana
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 46 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 6 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Sosial RI, Perwakilan Menteri Hukum dan HAM RI. Perwakilan Menteri Keuangan RI, Perwakilan Menteri Dalam Negeri, Perwakilan Menteri Kesehatan RI, Perwakilan MenPAN dan RB RI, dan Perwakilan DPD RI

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua

Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Pimpinan DPD RI, dengan agenda "Pembahasan atas RUU tentang Penanggulangan Bencana" disimpulkan sebagai berikut:

Komisi VIII DPR RI dan DPD RI, serta Pemerintah RI sepakat untuk menghentikan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana pada Tingkat I karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB. Komisi VIII DPR RI tetap berpegang pada RUU Penanggulangan Bencana bahwa nomenklatur kelembagaan BNPB disebutkan secara eksplisit dalam RUU Penanggulangan Bencana, sementara Pemerintah tidak mau menyebutkan secara eksplisit dan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga ini akan diatur dalam Peraturan Presiden untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.11 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**H. YANDRI SUSANTO, Spt.**